BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Sosialisasi

2.1.1 Pengertian Sosialisasi

Berkaitan dengan masalah yag dikemukakan sebelumnya dan sesuai dengan judul yan diambil, maka pada bab ini peneliti akan menjelaskan berbagai kerangka teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Teori-teori yang akan di ungkapkan adalah teori-teori mengenai proses sosialisasi, pengungkapan teori ini dibuat untuk pedoman dalam menganalisa masalah yang akan diteliti.

George Herbert Mead dalam bukunya sosialisasi pemerintahan:

> "Sosialisasi merupakan proses dimana manusia belajar melalui cara, nilai dan menyesuaikan tindakan dengan masyarakat dan budaya, ianya melihat bagaimana manusia meningkatkan pertumbuhan pribadi mereka agar sesuai dengan keadaan , nilai, norma dan budaya sebuah masyarakat tersebut yang berlaku disekelilingnya.melalui, merasi*,(feeling)* dan percaya diti sendiri dan proses sosialisasi dibudayakan sepanjang hayat". (George Herbert Mead1863-1931).

Sesuai dengan pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian sosialisasi yaitu proses dimana manusia belajar melalui cara,nilai dan menyesuaikan tindakan dengan masyarakat dan budaya,ianya melihat bagaimana manusia meningkatkan pertumbuhan pribadi mereka agar sesuai dengan keadaan,nilai,norma dan budaya sebuah masyarakat tersebut yang berlaku di sekelilingnya melalui,merasi,(feeling) dan percaya dri dari proses sosialisasi dibudayakan sepanjang hayat.

Sosialisasi perlu diberi ke atas individu-individu dan tingkah lakunya.Di mana setiap individu memegang peranan yang berbeda dalam sebuah masyarakat atau kelompok.Mead, berpandangan bahawa individu tersebut merupakan sebagian dari pada yang telah membantu menciptakan lingkungan tersebut. Beliau menetang pandangan bahawa perilaku individu adalah dipengaruhi oleh lingkungan sosial, walaupun kita memang perlu

hidup bermasyarakat dan berkelompok, tetapi kita tidak semestinya mengikuti tingkah laku masyaakat/kelompok tersebut.

Menurut Peter Berger dalam bukunya yang berjudul “sosialisasi dalam kebijakan pemerintahan” mengemukakan pendapatnya mengenai sosialisasi sebagai berikut:“Sosialisasi adalah suatu proses di mana seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat” (Peter 2003:39).

Pengertia sosialisasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa sosialisasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, dan proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam partisipasi masyarakat.

2.2 Pengertian Kebijakan

Kata kebijakan secara etimologis berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata *policy* sedangkan kebijaksanaan berasal dari kata *Wisdom*.Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

MenurutInu Kencana Syafie dalam bukunya yangberjudul”Pengantar Ilmu Pemerintahan” mengutip pendapat Horld Laswell bahwa kebijakan adalah:

> “Tugas Intelektual pembuatan keputusan meliputi penjelasan tujuan, penguraian kecenderungan, penganalisaan keadaan, proyeksi pengembangan masa depan dan penelitian, penilaian dan penelitian, serta penilaian dan pemilihan kemungkinan”(Laswell dalam Syafie, 1992:35).

Kebijakan sebenarnya telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, istilah kebijakan seringkali disamakan dengan istilah kebijaksanaan.Jika diuraikan terdapat perbedaan antara kebijakan dengan kebijaksanaan.Jika diuraikan terdapat perbedaan antara kebijakan dengan kebijaksanaan lebih ditekankan kepada pertimbangan dan kearifan seseorang yang berkaitan dengan aturan-aturan yang ada.Adapun pengertian kebijaksanaan lebih ditekankan kepada pertimbangan dan kearifan seseorang yang berkaitan dengan aturan-aturan yang

ada.Sedangkan kebijakan mencakup seluruh bagian aturan-aturan yang ada termasuk konteks politik, karena pada dasarnya proses pembuatan kebijakan sesungguhnya merupakan suatu proses politik.

Menurut Anderson dalam Tachjan mengatakan mengenai kebijakan bahwa:

> "kebijakan adalah serangkaian kebijakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan" (Anderson dalam Tachjan, 2006:19).

Sedangkan Menurut Carl Friedrich yang dikutip dalam Wahab mengatakan bahwa:

> "kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkanolehseseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan yang diinginkan" (Wahab, 2001:10).

Kajian tentang kebijakan dalam arti yang luas sebagai usaha pengadaan informasi yang diperlukan untuk menunjang proses pengambilan kebijakan telah ada sejak manusia mengenal organisasi dan tahu arti keputusan. Kajian ini dilakukan mulai dari cara yang paling sederhana dan rasional sampai dengan cara-cara yang bersifat kombinasi kuantitatif dan kualitatif sekarang ini.

Said Zainal Abidin, alumni university of pittburgh, pennsylvania, US. Mengatakan Kebijakan merupakan:

> "Kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit,tetapi dan berada pada strata strategis. Sebab itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus dibawahnya"(Said Zainal Abidin,2004:23).

Willian N.Dunn menyebut istilah kebijakan publik dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Analisis Kebijakan Publik" adalah:

> "Kebijakan publik (public policy) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihankolektif yang saling tergantung,termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintahan"(Dunn, 2003:132).

2.2.1 Syarat-Syarat Pelaksanaan Kebijakan

Sosalisasi atau pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu bagian dari proses kebijakan. Menurut Hoogerwerf (1990 : 47) merumuskan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut : “pengunaan sarana-sarana yang dipilih untuk tujuan-tujuan yang dipilih dan pada urutan waktu yang dipilih”.

Pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu tahap yang sulit karena terlibat banyak pihak atau aktor yang kemungkinan berbeda kepentingan dan aspirasinya. Untuk mengetahui sejauh mana suatu pelaksanaan kebijakan pemerintah itu mencapai tujuannya (efektif) maka perlu dicarikan faktor penyebab yang mempengaruhi atau menentukan berhasil tidaknya suatu pelaksanaan kebijakan, yang oleh Irfan Islamy (1998 : 98) disebut syarat-syarat pelaksanaan kebijakan, syarat-syarat tersebut ada 4 (empat) macam yaitu :

1. Isi kebijakan:
   Isi kebijakan yang akan dilaksanakan dapat mempersulit pelaksanaannya dengan berbagai cara, pertama-tama samarnya isi kebijakan yaitu tidak terperincinya tujuan-tujuan, sarana-sarana, dan penetapan prioritas program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.
2. Informasi kebijakan:
   Pelaksanaan suatu kebijakan memperkirakan atau yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu untuk dapat memainkan perannya dengan baik.
3. Dukungan kebijakan:
   Pelaksanaan suatu kebijakan akan sangat dipersulit jika para pelaksana tidak cukup dukungan untuk kebijakan, karena disini terkait kepentingan pribadi dan tujuan pelaksana, juga pengharapan-pengharapan tentang efektifitas sarana yang dipilih, keunggulan situasi masalah, latar belakang histories, tradisi dan kebiasaan rutin serta pendapat mengenai cara bagaimana pelaksanaan diorganisasi.
4. Pembagian potensi kebijakan:
   Mencakup tingkat diferensiasi tugas dan wewenang, masalah koordinasi, terutama jika kepentingan terwakili sangat berlainan, timbulnya masalah pengawasan ataupun timbulnya pergeseran tujuan, struktur organisasi pelaksana kebijakan, bila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas, atau ditandai pembatasan-pembatasan yang kurang jelas. (Islamy, 1992 : 98).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat terlihat bahwa syarat-syarat pelaksanaan kebijakan merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan

kebijakan dalam upaya menghindari kegagalan-kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan.Sehingga pelaksana kebijakan dapat melaksanakan tugasnya dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

2.3 Pengertian Sosialisasi Kebijakan

Sosialisasi merupakan sebuah proses yang paling penting yang secara sadar atau tidak selalu kita jalani setiap harinya.Sosialisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses pengenalan nila-nilai yang sedemikian rupa hingga akhirnya terbentuk suatu individu yang utuh. Maka dapat dikatakan seorang individu tidak pernah melakukan sosialisasi dengan sempurna, ia dapat diibaratkan sebagai seorang individu yang tidak utuh.

Sosialisasi merupakan aspek yang sangat penting dalam seluruh proses kebijakan karena kebijakan yang telah di buat akan bermanfaat bila di sosialisasikan. Menurut Harton dan hunt (1987 1989) sosialisasi kebijakan pada prinsipnya adalah “cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”.

Suatu program kebijakan harus di sosialisasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang di inginkan.sosialisasi di pandang sebagai proses interaksi antara satu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk mencapai tujuan kebijakan dimana didalam sosialisasi kebijakan aktor, organisasi, prosedur, dan teknik di pakai secara bersama.

Terlepasnya dari berbagai permasalahan seputar sosialisasi kebijakan, pada hakekatnya sosialisasi kebijakan ini harus dilakukan dalam konteks organisasi yang menyeluruh dengan tujuan dan target yang jelas, prioritas yang jelas sumber daya pendukung yang jelas pula. Sedangkan menurut Vembriarto (2004:106) sosialisasi kebijakan adalah “proses akomodasi dimana individu menahan, mengubah implus-implus dalam dirinya, dan mengambil cara hidup atau kebudayaan masyarakatnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan menguraikan teori yang penulis pilih untuk dijadikan acuan dalam penulisan laporan KKL ini, sesuai judul yang penulis pilih. Berikut adalah pengertian sosialisasi kebijakan yang

di ungkap oleh George Herbert Mead dalam bukunya yang berjudul "Sosialisasi Kebijakan Publik", yaitu:

> "Sosialisasi Kebijakan merupakan proses dimana manusia belajar melalui cara, nilai dan menyesuaikan tindakan dengan masyarakat dan budaya.ianya melihat bagaimana manusia meningkatkan pertumbuhan pribadi mereka agar sesuai dengan keadaan, nilai, norma dan budaya sebuah masyarakat tersebut yang berlaku di sekelilingnya melalui merasi, dan percaya diri sendiri dan proses sosialisasi dibudayakan sepanjang hayat"(George herbert Mead 1962:134).

Berdasarkan pengertian sosialisasi kebijakan yang di ungkap oleh George Herbert Mead diatas, maka George herbert Mead mengemukakan beberapa hal mengenai tahapan-tahapan yang diperlukan dalam proses sosialisasi kebijakan publik, yaitu:

1. Tahap Persiapan *(Preparatory Stage*
2. Tahap Meniru *(Play Stage)*
3. Tahap Siap Bertindak *(Game Stage)*

(George herbert Mead,1962:134)

Dari tahapan-tahapan sosialisasi kebijakan publik diatas maka untuk mengukur suatu keberhasilan suatu sosialisasi kebijakan dilihat dari indikator diatas adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan (preparatory Stage)

Tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan, saat seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya.Pada tahap ini juga anak mulai melakukan kegiatan meniru meski tidak sempurna. Dalam tahap ini, individu sebagai calon anggota masyarakat dipersiapkan dengan dibekali nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pedoman bergaul dalam masyarakat oleh lingkungan yang terdekat, yaitu keluarga.Lingkungan yang memengaruhi termasuk individu yang berperan dalam tahapan ini relatif sangat terbatas, sehingga proses penerimaan nilai dan norma juga masih dalam tataran yang paling sederhana.

2. Tahap Meniru *(Play Stage)*

Tahap ini ditandai dengan semakin sempurnanya seorang anak menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa. Pada tahap ini mulai terbentuk kesadaran tentang nama diri dan siapa nama orang tuanya,

kakaknya, dan sebagainya. Anak mulai menyadari tentang apa yang dilakukan oleh seorang ibu dan apa yang diharapkan seorang ibu dari dirinya. Dengan kata lain, kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain juga mulai terbentuk pada tahap ini. Kesadaran bahwa dunia sosial manusia berisikan orang-orang yang jumlahnya banyak telah juga mulai terbentuk.

3. Tahap Siap Bertindak *(Game Stage)*

Peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan digantikan peran yang secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Kemampuannya menempatkan diri pada posisi orang lain pun meningkat, sehingga memungkinkan adanya kemampuan bermain secara bersama-sama.

Pada tahap ini individu mulai berhubungan dengan temanteman sebaya di luar rumah.Peraturan-peraturan yang berlaku di luar keluarganya secara bertahap mulai dipahami. Bersamaan dengan itu, anak mulai menyadari bahwa ada norma tertentu yang berlaku di luar keluarganya.

.

2.4 Angka kematian Bayi (AKB)

Departemen Kesehatan (Depkes) mengungkapkan rata-rata pertahun terdapat 401 bayi bayi baru lahir di Indonesia meninggal dunia sebelum umurnya genap 1 tahun.Data bersumber dari survey terakhir pemerintah, yaitu dari survey demografi kesehatan Indonesia 2011 (SKDI).

Berdasarkan survey lainnya, yaitu riset kesehatan dasar depkes 2011, kematian bayi baru lahir (neonates) merupakan penyumbang kematian terbesar pada tingginya angka kematian balita (AKB). Setiap tahun sekitar 20 bayi per 1.000 kelahiran hidup terenggut nyawanya dalam rentang waktu 0-12 hari, menurut Depkes, disebabkan oleh sepsis (ifeksi sistemik), kelainan bawaan, dan infeksi saluran pernapasan atas.

Selaras dengan target pencapaian , Depkes telah mematok target penuruhan AKB di Indonesia dari rata-rata 36 meninggal per 1.000 kelahiran hidup menjadi 23 per 1.000 kelahiran hidup pada 2015.

2.5 Angka kematian Ibu (AKI)

Angka kematian ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan. Angka kematian ibu juga merupakan salah satu target yang telah ditentukan dalam tujuan pembangunan millennium pada tujuan ke 5 yaitu meningkatkan kesehatan ibu dimana target yang akan di capai sampai tahun 2015 adalah mengurangi sampai ¾ resiko jumlah kematian ibu. Dari hasil survei yang dilakukan AKI telah menunjukan penurunan dari waktu ke waktu, namun demikian upaya untuk mewujudkan target tujuan pembangunan millenium masih membutuhkan komitmen dan usaha keras yang terus menerus.

2.6 Upaya Menurunkan AKI dan AKB

Departemen kesehatan menargetkan angka kematian ibu pada 2011 sekitar 226 orang dan pada tahun 2015 menjadi 102 orang per tahun. Untuk mewujudkan hal ini, salah satu upaya terobosan dan terbukti mampu meningkatkan indikator proksi (persalinan oleh tenaga kesehatan) dalam penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi adalah program perencanaan persalinan pencegahan komplikasi (P4K).program dengan menggunakan “stiker” ini, dapat meningkatkan peran aktif suami (suami siaga), keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman. Program persiapan menghadapi komplikasi pada saat kehamilan, termasuk perencanaan pemakaian alat/obat kontrasepsi pasca persalinan.

Selain itu program P4K juga mendorong ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan, bersalin, pemeriksaan nifas dan bayi yang dilahirkan oleh tenaga kesehatan terampil termasuk skrining status imunisasi tetanus lengkap pada setiap ibu hamil.Kaum ibu juga di dorong untuk melakukan inisiasi menyusun dini (IMD) dilanjutkan pemberian (ASI) eksklusif selama 6 bulan. Perencanaan persalinan dapat dilakukan manakala itu, suami dan keluarga memiliki pengetahuan mengenai tanda bahaya kehamilan, persalinan dan nifas, asuhan perawatan ibu dan bayi, pemberian asi, jadwal imunisasi, serta informasi lainnya. Semua informasi tersebut ada di dalam buku KIA yang diberikan kepada ibu hamil setelah didata melalui P4K.buku Kia juga berfungsi sebagai alat pemantauan

perkembangan kesehatan ibu hamil serta pemantauan pertumbuhan bayi sampai usia 5 tahun.

Selain itu pemerintah melalui departemen kesehatan juga menerapkan strategi making pregnancy safer (MPS), atau ‘membuat kehamilan lebih aman’, yang merupakan penajaman dari kebijakan sebelumnya tentang ‘ Penyelamatan ibu Hamil’. Strategi MPS yang memberi penekanan kepada aspek medis, walaupun tidak mengabaikan aspek non-medis.

Indonesia telah merencanakan making pregnancy safer (MPS) sebagai strategi pembangunan kesehatan masyarakat menuju Indonesia sehat 2011 pada 12 Oktober 2000 sebai bagian dari program Safe Motherhood. Dalam arti kata luas tujuan safe Motherhood dan Making Pregnancy safer sama, yaitu melindungi hak reproduksi dan hak asasi manusia dengan mengurangi beban kesakitan, kecacatan dan kematian yang berhubungan dengan kehamilan dan persalinan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. MPS merupakan strategi sektor kesehatan yang focus pada pendekatan perencanaan sistematis dan terpadu dalam melaksanakan intervensi klinis pada pelayanan kesehatan. MPS dilaksanakan berdasarkan upaya-upaya yang telah ada dengan penekanan pada pentingnya kemitraan antara sektor pemerintah,lembaga pembangunan,sektor swasta,keluarga dan anggota masyarakat.

Strategi MPS mendukung target internasional yang telah disepakati. Dengan demikian, tujuan global MPS adalah untuk menurunkan kesakitan dan kematian ibu dan bayi baru lahir sebagai berikut:

a. Menurunkan angka kematian ibu sebesar 75% pada tahun 2015 dari AKI tahun 1990.
b. Menurunkan angka kematian bayi menjadi kurang dari 35/1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015.

2.7 Surat Keputusan Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 Tentang petunjuk Jaminan Persalinan

Jaminan persalinan adalah pembiayaan jaminan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan,pertolongan persalinan,pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.

Dan akhirnya dengan persetujuan bersama antara Menteri Kesehatan Republik Indonesia (MK RI) dengan Presiden Rebuplik Indonesia memutuskan untuk menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011. Dan dalam peraturan ini dimaksud dengan :

1. Dalam rangka menurunkann angka kematian ibu dan bayi dan mempercepat pencapaian MDG'S telah di tetapkan kebijkan bahwa setiap ibu yang melahirkan, biaya persalinannya ditanggung oleh pemerintah melalui Program Jaminan Persalinan.
2. Agar program jaminan persalinan dapat berjalan dengan baik dan efisien diperlukan petunjuk teknis pelaksanaan.
3. Petunjuk teknis jaminan persalinan yang telah di atur dalam peraturan menteri kesehatan nomor 631/Menkes/Per/III/2011 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan di daerah.
4. Berdasarkan pertimbangan jaminan persalinan di maksud pada angka kematian ibu dan bayi, perlu menetapkan peraturan Menteri Kesehatan Tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.

. Berikut adalah penjelasan mengenai teori-teori yang dipilih penulis, sebagai acuan untuk menulis laporan KKL ini.Serta yang peneliti gunakan yang relevan dan sesuai dengan judul yang dibahas dalam laporan KKL ini.